

Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI								
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN UMUM, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN								
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,61	3,67	5,27	3,68	Belum Tercapai	Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sedikit lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena beberapa sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif seperti Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Selain itu, sektor ekonomi yang tumbuh negatif pada tahun 2022 yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mulai pulih kembali di tahun 2023. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi masih belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah karena beberapa sektor mungkin tidak tumbuh secepat yang diharapkan, seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang hanya tumbuh sedikit dari tahun sebelumnya. Jika sektor-sektor utama ini tidak tumbuh sesuai harapan, maka pertumbuhan ekonomi keseluruhan akan terpengaruh.
2	Laju Inflasi	%	1,83	2,16	1,82	2,78	Belum Tercapai	Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Komoditas utama penyumbang inflasi y-on-y pada Desember 2023, antara lain beras, cabai rawit, cabai merah, emas perhiasan, gula pasir, bawang putih, minyak goreng, rokok kretek filter, tempe, dan sabun cair/cuci piring.
3	PDRB per kapita (juta) ADHB	Rp / Juta	47,78	53,76	48,33	56,57	Melampaui	Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar yang positif di tahun 2023 menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, yang berkontribusi pada peningkatan PDRB.
4	Gini Ratio	%	0,343	0,350	0,336	0,345	Belum Tercapai	Meskipun ekonomi tumbuh 3,68% pada tahun 2023, kemungkinan pertumbuhan ini tidak merata di seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, meskipun pendapatan total naik, namun masih ada kelompok masyarakat yang tidak merasakan peningkatan tersebut.
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	11,34	12,24	10,54	12,27	Belum Tercapai	-Struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan). Sektor primer cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap faktor alam dan permintaan pasar, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga dan musim. Sementara sektor sekunder, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi ekonomi, masih memiliki kontribusi yang rendah terhadap perekonomian. -Pada tahun 2023, inflasi di Kabupaten Kepulauan Selayar meningkat dari tahun sebelumnya. Inflasi dapat menggerus daya beli masyarakat, inflasi juga dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk lokal.
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	68,19	68,35	68,60	69,20	Melampaui	

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
7	Angka Melek Huruf (AMH)	%	93,97	91,62	93,97	93,06	Belum Tercapai	Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab indikator tersebut belum mencapai target, yaitu akses pendidikan yang terbatas, sistem pendidikan, tantangan pembelajaran, faktor sosial, kondisi ekonomi, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi orang tua tentang pentingnya pendidikan.
8	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10	8,08	10,5	8,35	Belum Tercapai	Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab indikator tersebut belum mencapai target, yaitu akses pendidikan yang terbatas, sistem pendidikan, tantangan pembelajaran, faktor sosial, kondisi ekonomi, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi orang tua tentang pentingnya pendidikan.
9	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,97	68,81	69,23	73,27	Melampaui	
10	Persentase Balita Stunting	%	18,94	20,58	18,83	18,00	Melampaui	
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,78	69,92	69,08	69,93	Melampaui	Data diambil dari bps.
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,38	1,49	2,33	2,81	Belum Tercapai	Data diambil dari bps.
13	Rasio penduduk yang bekerja	%	98,33	52,20	98,50	99,77	Melampaui	Data diambil dari bps.
14	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	0,07	5,39	0,07	9,01	Melampaui	Melewati target penerimaan pendapatan disebabkan karena BLUD RSUD K.H. HAYYUNG di tahun 2023 yang mencapai persentase 100% dimana tahun-tahun sebelumnya belum pernah mencapai target.
15	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	-	Dalam Proses	<i>Unaudite.</i>
16	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	79,87	76,9	79,9	81,4	Melampaui	Skor PPH tahun 2023 sebesar 81.4 mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu 76.9 sebesar 5.85%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan.
17	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	7,85	7,76	8,48	6,96	Belum Tercapai	Peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan lainnya didukung oleh peningkatan penggunaan sarana pertanian berupa benih, pupuk, pestisida dan alsintan sesuai anjuran. Faktor iklim juga sangat mempengaruhi produktivitas tanaman. Selain itu didukung pula oleh kebijakan pembangunan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI) berbasis Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan dalam peningkatan produksi pangan strategis.

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
18	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	21.232,00	21.766,90	22.117,00	25.431,34	Melampaui	Total produksi perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan 16,8 % dari 21.766,90 Ton di tahun 2022 menjadi 25.431,34 Ton di tahun 2023. Peningkatan produksi ini juga diikuti dengan kenaikan harga jual rata-rata dari Rp. 22.810/kg di tahun 2022 menjadi Rp.23.122/kg di tahun 2023. Peningkatan volume produksi dan kenaikan harga jual tersebut memberi dampak positif terhadap perekonomian pelaku usaha perikanan, hal ini tergambar dalam Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya. Nilai tukar adalah salah satu indikator kesejahteraan pelaku usaha perikanan yang diperoleh dari kemampuan tukar hasil produksi terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan rumah tangga (>100 = Surplus, <100 = Defisit). Pada tahun 2022, Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya masing-masing sebesar 109,29 dan 109,98. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 111,49 dan 111,35.
19	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	%	16,83	16,23	17,16	16,99	Belum Tercapai	
20	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	%	3,09	2,64	3,28	2,5	Belum Tercapai	Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB disebabkan penurunan produksi pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura sebagai dampak el Nino.
21	Kontribusi sektor hortikultura terhadap PDRB	%	0,99	0,95	1,04	0,94	Belum Tercapai	
22	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	%	10,99	11,53	11,54	12,18	Melampaui	Peningkatan kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB disebabkan oleh peningkatan produksi tanaman perkebunan yang didukung peningkatan jumlah tanaman produktif/ menghasilkan, pemeliharaan tanaman yang lebih baik dan adanya upaya pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
23	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	%	1,17	1,11	1,18	1,09	Belum Tercapai	
24	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	23,73	27,09	24,73	27,09	Melampaui	Capaian PDRB sub sektor perikanan telah melebihi target dan cenderung naik dari tahun-tahun sebelumnya. Kontribusi PDRB sub sektor perikanan terhadap PDRB kabupaten tahun 2022 yaitu 27,09% dari target 23,73%, sedangkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 27,09% dari target 24,73%. Jika melihat PDRB atas dasar harga berlaku, maka capaian PDRB sub sektor perikanan yaitu 2.026.629 juta rupiah dari PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 7.480.469 juta rupiah. Capaian tersebut menjadi kontribusi sub sektor terbesar dalam struktur PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya volume produksi, harga produksi perikanan dan pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan yaitu sebesar 5,59% di tahun 2022 dan 5,59% di tahun 2023.
25	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	7,84	8,02	7,85	8,08	Melampaui	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
26	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	2,84	2,78	2,85	2,82	Belum Tercapai	Industri Pengolahan.
27	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Rp	14.529.626	17.310.000	14.645.819	18.740.000	Melampaui	
ASPEK PELAYANAN UMUM								
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
a. PENDIDIKAN								
1	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	100,00	65,50	100,00	97,83	Belum Tercapai	Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab indikator tersebut belum mencapai target, yaitu akses pendidikan yang terbatas, sistem pendidikan, tantangan pembelajaran, faktor sosial, kondisi ekonomi, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi orang tua tentang pentingnya pendidikan.
2	Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100,00	78,74	100,00	98,68	Belum Tercapai	Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab indikator tersebut belum mencapai target, yaitu akses pendidikan yang terbatas, sistem pendidikan, tantangan pembelajaran, faktor sosial, kondisi ekonomi, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi orang tua tentang pentingnya pendidikan.
3	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100,00	88,46	100,00	98,37	Belum Tercapai	Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab indikator tersebut belum mencapai target, yaitu akses pendidikan yang terbatas, sistem pendidikan, tantangan pembelajaran, faktor sosial, kondisi ekonomi, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi orang tua tentang pentingnya pendidikan.
4	Cakupan Persentase Muatan Lokal dalam Kurikulum PAUD dan Pendidikan Dasar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai	
5	Persentase Satuan Pendidikan Memiliki Guru dan Tenaga Kependidikan Sesuai Kebutuhan Berdasarkan Rombel dan Standar Kurikulum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai	
6	Persentase Jumlah lembaga/satuan pendidikan terdaftar yang diselenggarakan oleh masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai	
7	Persentase Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan sastra Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai	
b. KESEHATAN								
1	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	76,3	100	100	Sesuai	
2	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	76,4	100	98,42	Belum Tercapai	Masih adanya persalinan yang dilakukan/ ditangani di luar Tenaga Kesehatan (Dukun).
3	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	80,04	100	100	Sesuai	
4	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	54,8	100	84,95	Belum Tercapai	Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan balita di puskesmas.

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
5	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	68,97	100	85,90	Belum Tercapai	Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan warga negara usia pendidikan dasar.
6	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	Sesuai	
7	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	50,9	100	100	Sesuai	
8	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	Sesuai	
9	Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	Sesuai	
10	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	100	100	100	100	Sesuai	
11	Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	Sesuai	
12	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	85,56	100	70,85	Belum Tercapai	Pemeriksaan HIV pada ibu hamil sebagai populasi kunci terutama untuk desa sangat terpencil di kepulauan sulit untuk dijangkau, karena sarana transportasi yang terbatas; RDT HIV yang sangat terbatas tidak mencukupi untuk pustu yang terdapat di desa-desa terpencil.
13	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	76,3	100	100	Sesuai	
14	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	Angka	31/1000 Penduduk	31/1000 Penduduk	36/1000 Penduduk	36/1000 Penduduk	Sesuai	
15	Persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	%	100	100	100	100	Sesuai	
16	Persentase penurunan masalah kesehatan masyarakat	%	40	37,41	30,00	30,19	Melampaui	
17	Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Nilai	Utama	Utama	Utama	Utama	Sesuai	
c. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	0,8800	0,7872	90,00	100	Melampaui	

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
2	Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	0,34	0	38,00	100	Melampaui	
3	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	1,80	1,78	1,85	3,91	Melampaui	
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	58,23	100	59,22	Belum Tercapai	
5	Persentase Sarana Prasarana Persampahan	%	100	0	100,00	0,00	Belum Tercapai	Tidak ada kegiatan tahun 2023.
6	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	0	100,00	0,00	Belum Tercapai	Tidak ada kegiatan tahun 2023.
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	%	95,55	55	96,45	55,00	Belum Tercapai	
8	Persentase Infrastruktur Pemukiman terbangun pada Kawasan Strategis	%	-	-	5,00	0,00	Belum Tercapai	Tidak ada kegiatan tahun 2023.
9	Persentase kepatuhan IMB	%	83	41	85,00	100,00	Melampaui	
10	Persentase Pemeliharaan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya Milik Pemerintah	%	60,92	60	70,11	0,00	Belum Tercapai	Tidak ada kegiatan tahun 2023.
11	Persentase Pemeliharaan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	%	58,73	44,73	69,84	0,00	Belum Tercapai	Tidak ada kegiatan tahun 2023.
12	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	%	71,43	58,24	72,31	57,26	Belum Tercapai	
13	Proporsi panjang jalan desa yang terbangun	%	80	0	85,00	-	Dalam Proses	6075,7 m Panjang Jalan Desa yang Terbangun Tahun 2023 (SK Jalan Desa belum ada).
14	Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten	%	98	96	98,50	96,25	Belum Tercapai	
15	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	21,11	4,90	22,02	15,60	Belum Tercapai	Kurangnya Peserta yang mengikuti kegiatan.
16	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	5	0	10,00	0,45	Belum Tercapai	
17	Persentase Pembangunan yang Sesuai RTRW dan RDTR	%	96	86	97,00	88,89	Belum Tercapai	
d.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	86,22	100	98,98	Belum Tercapai	Tidak ada SK Penetapan Bencana yang dikeluarkan oleh BPBD.
2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	0	100	0	Sesuai	Tidak ada warga negara yang direlokasi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai akibat dari Program Pemerintah Daerah.
3	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	%	2,11	6,32	3,16	6,32	Melampaui	Tidak ada peningkatan persentase penurunan luas kawasan kumuh karena penanganan yang dilakukan tidak masuk dalam SK Kumuh.
4	Persentase Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	3,72	1,31	5,91	3,48	Belum Tercapai	
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	0,58	0,56	1,41	1,03	Belum Tercapai	
6	Persentase rekomendasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	%	100	0	100	0	Sesuai	Tidak adanya pengembang yang memenuhi kriteria untuk penerbitan sertifikat sebagai acuan permintaan bantuan PSU Perumahan.
e. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	95,00	Belum Tercapai	Adanya patroli rutin yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan patroli cipta kondisi/ patroli skala besar yang merupakan patroli gabungan antara Satpol PP, TNI dan Patroli.
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai	Tidak ada korban warga negara yang terdampak akibat penegakan perda dan perkada. Akan tetapi penegakan hukum perda dan perkada tetap terlaksana.
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100,00	92,68	100,00	77,63	Belum Tercapai	Karena banyaknya kebakaran lahan yang lokasinya jauh/ sulit dijangkau.
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	11,26	7,58	10,93	11,84	Belum Tercapai	Karena banyaknya kebakaran lahan yang lokasinya jauh/ sulit dijangkau.
5	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi bencana	%	100	100	100	100,00	Sesuai	Kegiatan pada layanan informasi rawan bencana terselenggara dengan optimal sesuai dengan jumlah alokasi anggaran yang termanfaatkan, pencapaian target disini dapat diartikan bahwa target yang dicapai disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diberikan.

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
6	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	99,98	Belum Tercapai	Kegiatan pada layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana terselenggara dengan optimal sesuai dengan jumlah alokasi anggaran yang termanfaatkan, pencapaian target disini dapat diartikan bahwa target yang dicapai disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diberikan. Namun apabila terdapat alokasi anggaran yang lebih memadai maka kegiatan-kegiatan lain yang mendukung layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dapat terlaksana, seperti contoh kegiatan gladi kesiapsiagaan, dan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
7	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	87,30	100,00	99,64	Belum Tercapai	Kegiatan pada layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum optimal dikarenakan kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (tanggap darurat) seperti kurangnya kendaraan operasional (mobil rescue) dan kurang optimalnya kondisi kendaraan yang berfungsi sebagai alat mobilisasi penanganan darurat bencana di wilayah yang terdampak bencana.
f.	SOSIAL							
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan yang Diberdayakan	%	32,67	13,70	37,59	12,58	Belum Tercapai	Karena keterbatasan anggaran sehingga jumlah PSKS (TKSK, pendamping PKH dan Anggota Karang Taruna) yang diberi pemberdayaan berupa bimtek, pelatihan dan sosialisasi masih kurang.
2	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai	Indikator ini juga merupakan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang realisasi penanganannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun dengan pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta melalui Balai Pangurangi Takalar dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar.
3	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100,00	98,59	100,00	100,00	Sesuai	
4	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100,00	98,99	100,00	100,00	Sesuai	
5	PersentaseWarga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai	
6	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	18,36	47,55	21,32	40,54	Melampaui	Realisasi melebihi target karena ada beberapa bantuan yang dibiayai oleh APBN dan APBD Provinsi.
7	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasilitasi	%	35,15	47,55	38,12	40,74	Melampaui	Realisasi melebihi target karena ada beberapa bantuan yang dibiayai oleh APBN dan APBD Provinsi.

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
8	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai	Seluruh laporan bencana yang diterima oleh Dinsos telah diassesmen dan ditindaklanjuti dengan pemberian pelayanan dan bantuan permukiman/ sandang/ tempat penampungan sementara.
9	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Sesuai	TMP yang dikelola terletak di Desa Barugaia Kecamatan Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar.
NON PELAYANAN DASAR								
a. TENAGA KERJA								
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (RTK)	%	70,00	77,70	73,00	50,00	Belum Tercapai	Kegiatan dipengaruhi oleh perusahaan yang membuat rencana tenaga kerja, sampai sekarang belum ada perusahaan yang menyusun RTK, namun telah disusun Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro; Sosialisasi dan pelatihan untuk penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro bagi Perusahaan diperlukan, namun terhalang ketersediaan anggaran.
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,40	0,48	1,17	2,63	Melampaui	Banyaknya pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK dan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan.
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan	%	19,84	39,06	25,00	27,55	Melampaui	Karena peserta yang dilatih secara mandiri diberikan bantuan peralatan kerja untuk membuka usaha mandiri.
4	Persentase Perusahaan yang Menerapkan tata kelola perusahaan yang layak	%	0,60	0,60	0,90	0,94	Melampaui	Karena melaksanakan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan.
b. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,25	0,543	0,25	0,90	Melampaui	
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	33 / 1000 penduduk perempuan	9,56	28 / 1000 penduduk perempuan	1,56	Belum Tercapai	Belum ada kebijakan Kabupaten tentang TPPO (Tindak pidana perdagangan orang).
3	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang terstandarisasi	%	0,05	0	0,06	0,00	Belum Tercapai	Belum pernah dilakukan standarisasi Puspaga oleh tim standarisasi Puspaga Kementerian PPPA (bekerjasama dengan tim standarisasi Pusoaga daerah).
4	Cakupan Layanan Sistem Informasi Gender dan Anak	%	0,18	0,80	0,36	0,36	Sesuai	
5	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (skor indikator KLA)	%	50,00	138,89	52,50	65,00	Melampaui	
6	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten	%	100	0,045	100	100	Sesuai	Semua korban kekerasan anak yang dilaporkan pada DP3AP2KB sudah ditangani.
c. PANGAN								

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Persentase desa rawan pangan yang ditangani	%	50	24,39	62,5	60,87	Belum Tercapai	Penanganan kerawanan pangan dilakukan pada 31 desa/kelurahan yang termasuk desa rawan pangan prioritas 1-3 (sangat rentan - agak rentan). Tahun 2023 terdapat 14 desa yang keluar dari desa rawan pangan prioritas 1-3. Desa rentan pangan ditandai dengan beberapa indikator penyebab berdasarkan hasil analisis komposit yaitu: Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk desa/kelurahan; Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa/kelurahan; Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk desa/kelurahan; Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga desa/kelurahan; Jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah (desil-1) terhadap jumlah penduduk desa/kelurahan.
2	Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan	%	27,27	48,33	36,36	51,47	Melampaui	Lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal sebagai pangan alternatif. Keragaman mutu belum memenuhi harapan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Demikian pula dari segi keragaman dan keseimbangannya yaitu konsumsi padi-padian masih berlebih sedangkan konsumsi sayuran dan buah, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan masih kurang. Salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan diversifikasi pangan adalah menghadirkan budaya atau kebiasaan mengonsumsi makanan pokok selain beras. Disinilah, nantinya masyarakat yang memilih komoditas apa yang dikonsumsi, pengganti beras; ketersediaan pangan lokal pengganti beras; keterjangkauan harga pangan lokal.
3	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	52,5	19,35	57,5	34,78	Belum Tercapai	Upaya penanganan kerawanan pangan dilakukan pada 8 desa/kelurahan dari 23 desa/kelurahan yang termasuk desa rawan pangan prioritas 1-3 (sangat rentan - agak rentan).
4	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	80	100	80	80	Sesuai	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dilakukan selama 1 tahun misalnya pada saat dimana pengawasan keamanan dan mutu pangan telah menjadi perhatian, mengingat bahan pangan khususnya pangan segar adalah produk yang memiliki karakteristik mudah rusak akibat kontaminasi oleh cemaran kimia, fisik maupun mikrobiologi. Keamanan pangan tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan akan tetapi juga menentukan nilai ekonomi dari bahan pangan itu sendiri. Selain itu, peran SDM pertanian sangat menentukan kualitas produk pertanian.
d.	PERTANAHAN							
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	50	0	50	35,65	Belum Tercapai	
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	40	20	40	0	Belum Tercapai	Tidak ada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	40	1	60	0	Belum Tercapai	Tidak tersedia lokasi pembangunan karena belum ada penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
4	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	60	60	70	-	Dalam Proses	Dalam Proses.
5	Penyelesaian kasus tanah untuk pembangunan	%	100	0	100	-	Dalam Proses	Dalam Proses.
6	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	100	40	1,97	Belum Tercapai	
7	Persentase luas lahan Ulayat yang di tetapkan	%	0	0	40	0	Sesuai	Tidak terdapat tanah yang masuk kategori tanah ulayat.
8	Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan pemanfaatannya	%	40	40	50	0	Sesuai	Tidak Ada penetapan pemanfaatan tanah kosong di Kabupaten Kepulauan Selayar.
9	Persentase rekomendasi izin membuka tanah untuk kepentingan masyarakat yang dikeluarkan	%	100	100	100	0	Sesuai	Tidak ada rekomendasi izin membuka lahan untuk kepentingan masyarakat (sudah dikuasai oleh masyarakat).
10	Persentase Pemanfaatan tanah sesuai Zona Nilai Tanah	%	30	30	40	-	Dalam Proses	Dalam Proses.
e. LINGKUNGAN HIDUP								
1	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH yang trintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kabupaten	%	12,50	11,25	12,50	12,50	Sesuai	10 Tahapan yang harus terpenuhi untuk mencapai target telah terpenuhi.
2	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	Poin	2,59	1,76	2,59	2,01	Melampaui	Nilai Indeks Pencemaran yaitu 2,01 (cemar ringan), semakin rendah nilai IP maka semakin baik status mutu air.
3	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%	1,38	1,40	1,38	1,40	Melampaui	Luas RTH Publik (1887,45 Ha) dibagi Luas wilayah (135.403 Ha) dikali 100% = 1,40%.
4	Persentase Lembaga/Perusahaan penghasil Limbah B3 yang Diawasi (%)	%	100	100	100,00	100,00	Sesuai	Dari total jumlah pelaku usaha semua telah di awasi.
5	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan / Atau Kegiatan	%	64	60	64,00	51,20	Belum Tercapai	Dari 15 pelaku usaha yang dibina, hanya 12 pelaku usaha yang taat.
6	Persentase MAH Kearifan Lokal yang terkait PPLH yang diakui keberadaannya	%	1,14	1,42	2,27	1,43	Belum Tercapai	Dari 25 desa yang akan dilakukan pendataan kearifan lokal hanya 20 yang didata.
7	Persentase Lembaga Masyarakat yang diberikan Diklat	%	23,08	28,85	23,08	23,08	Sesuai	
8	Persentase Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan yang berprestasi	%	33,33	25,00	33,33	20,00	Belum Tercapai	Dari target 28 desa yang akan dilakukan pembinaan hanya 17 yang berprestasi.

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
9	Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan	%	100	100	100,00	100,00	Sesuai	Dari 8 pengaduan yang masuk semua telah di lakukan verifikasi.
10	Persentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi	%	1,3	2,83	1,30	1,66	Melampaui	Sampah yang terkelola yang bernilai ekonomi sebesar 7.670 Ton dari target 6000 Ton.
f. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Persentase Penerbitan KTP elektronik	%	97,00	91,40	97,00	92,77	Belum Tercapai	Belum Mencapai Target disebabkan karena ketidak tersediaan anggaran untuk melakukan pelayanan keliling ke Kecamatan Daratan Maupun Kecamatan Kepulauan.
2	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	32,00	50,27	35,00	54,08	Melampaui	Melampaui Target.
3	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	%	93,75	96,60	94,00	86,96	Belum Tercapai	Belum Mencapai Target disebabkan karena ketidak tersediaan anggaran untuk melakukan pelayanan keliling ke Kecamatan Daratan Maupun Kecamatan Kepulauan.
4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	57,69	44,44	76,92	61,54	Belum Tercapai	Adanya penambahan persyaratan berupa sertifikat ISO dari Kementerian Dalam Negeri bagi OPD yang akan melakukan kerja sama dalam pemanfaatan data kependudukan sementara belum ada OPD di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki Sertifikat ISO.
5	Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai	Sesuai Target.
g. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi	%	100	100	100	100	Sesuai	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi sesuai dengan target, dimana pada Tahun 2023 Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa dengan 8 Desa Sasaran telah difasilitasi yaitu Desa Balang Butung, Desa Parak, Desa Mekar Indah, Desa Barugaiya, Desa Bonea Makmur, Desa Appatanah, Desa Buki dan Desa Pamatata.
2	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	%	3,7	1,23	3,7	8,6	Melampaui	Persentase Peningkatan Kerja sama desa melampaui target karena adanya Kerja sama Antar Desa di Kecamatan Buki terkait Pembentukan BUMDes Bersama.
3	Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi	%	100	100	100	100	Sesuai	Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa dengan target yang ditetapkan dimana pada Tahun 2023 sebanyak 81 Desa yang telah difasilitasi seperti Penyelenggaraan Administrasi Desa, Penyusunan Produk Hukum Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Fasilitasi Penetapan Batas Desa dan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa/Kelurahan.
4	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	%	33,33	33,33	33,33	33,33	Sesuai	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan Kapasitasnya Sesuai target. Pada tahun 2023 dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga Kemasyarakatan selain Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan ke Desa juga diadakan Bimbingan Teknis dalam rangka peningkatan Kapasitas Kelembagaan dengan sasaran semua desa yang ditargetkan untuk mengikuti Peningkatan kapasitas terpenuhi.

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
h. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Poin	2,08	2,17	2,07	1,94	Melampaui	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	78,45	72,54	78,80	69,42	Belum Tercapai	Terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ikut menjadi peserta KB karena ada PUS yang hamil dan ada yang ingin segera memiliki anak.
3	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK K R, dan UPPKS)							
	BKB	%	0,74	10,24	0,74	29,18	Melampaui	
	BKR	%	0,61	1,23	0,61	2,71	Melampaui	
	BKL	%	0,62	17,70	0,62	40,01	Melampaui	
	PIK-R	%	0,51	68,92	0,51	73,03	Melampaui	
	UPPKS	%	0,91	26,99	0,91	43,19	Melampaui	
i. PERHUBUNGAN								
1	Persentase Kinerja Lalu lintas Kabupaten	%	30,69	25,23	30,77	37,92	Melampaui	Persentase Kinerja Lalu Lintas Kabupaten mengalami peningkatan sebesar 7.15% di tahun 2023 tingkat dikerenakan kecepatan tempuh yang semakin tinggi dan arus lalu lintas yang semakin baik. Hal ini jg ditandai dengan kondisi ruas jalan yang semakin baik dalam melayani volume kendaraan yang ada, kemudian adanya perbaikan di beberapa ruas jalan dan juga pemberlakuan jalan satu arah di beberapa ruas jalan yang dirasa perlu jg turut menunjang peningkatan Kinerja Lalu Lintas Jalan Kabupaten.
2	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi (%)	%	55,73	41,37	60,66	44,07	Belum Tercapai	Terbatasnya anggaran yang ada; dan Terjadinya Bencana alam yang mengakibatkan kerusakan pada Tambatan Perahu layak fungsi.
3	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	%	0	0	0	0	Sesuai	Belum adanya investor yang menjadi penggerak sehingga rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter belum bisa diterbitkan.
j. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Persentase layanan system informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang berkualitas	%	50,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai	Terdapat 7 Layanan Sistem Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang berkualitas (Youtube (kominfo selayar), Facebook (@keulauan_selayar), Instagram (@keulauan selayar), Website (www.kepulauanselayar.go.id), Twitter (@kep_selayar), Tiktok (@humas.selayar), Snackvideo (humaskominfose)).
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara terintegrasi	%	50,00	26,08	100,00	100,00	Sesuai	Terdapat 23 Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dari 23 Layanan Publik.
k. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	%	100,00	18,23	100,00	100,00	Sesuai	Seluruh koperasi simpan pinjam yang ada memiliki izin usaha simpan pinjam sesuai ketentuan yang berlaku.
2	Persentase koperasi sehat	%	100,00	18,37	100,00	19,70	Belum Tercapai	Jumlah koperasi sehat meningkat di tahun 2023 sehingga persentase yang didapatkan menjadi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
3	Persentase Koperasi KSP/USP yang sehat	%	100,00	11,10	100,00	81,82	Belum Tercapai	Dari seluruh koperasi KSP/USP yang ada, hampir seluruhnya tergolong koperasi KSP/USP yang sehat sehingga persentase yang didapatkan tinggi.
4	Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan	%	100,00	24,15	100,00	17,27	Belum Tercapai	Di tahun 2023, pengurus koperasi yang mendapatkan pelatihan lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya sehingga persentase menjadi lebih kecil. Selain itu, penganggaran untuk pelatihan lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.
5	Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan mendapatkan perlindungan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai	Seluruh koperasi yang ada berhak untuk diberdayakan dan mendapatkan perlindungan sehingga persentase yang didapatkan menjadi 100%.
6	Persentase UMKM yang Diberdayakan	%	100,00	54,62	100,00	55,00	Belum Tercapai	Jumlah UMKM yang diberdayakan melalui pemberian pelatihan selama tahun 2023 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya sehingga persentasenya meningkat.
7	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya	%	100,00	45,67	100,00	46,20	Belum Tercapai	Jumlah UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pemberian bantuan peralatan lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya sehingga persentasenya meningkat.
I. PENANAMAN MODAL								
1	Persentase Potensi untuk Peluang Investasi Daerah	%	40	100	50	100	Melampaui	
2	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor/ Pelaku Usaha	20	2.281	28	1.878	Melampaui	Program tersebut didukung secara tidak langsung oleh anggaran DAK Non Fisik.
3	Persentase Izin yang diterbitkan	%	100	100 (2.773 izin)	100	100 (1.878 Izin/NIB)	Sesuai	Program tersebut didukung secara tidak langsung oleh anggaran DAK Non Fisik.
4	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	Rp	52.000	12.826	59.000	76.286	Melampaui	Program tersebut didukung secara tidak langsung oleh anggaran DAK Non Fisik.
5	Persentase permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	Sesuai	
m. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	4,20	4,20	8,83	0,13	Belum Tercapai	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri masih belum mencapai target. Hal ini bisa saja disebabkan karena masih adanya wirausaha muda yang belum terdaftar pada pendataan wirausaha muda.
2	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	40,00	42,50	50,00	67,00	Melampaui	

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
3	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dikembangkan kapasitas dan daya saingnya	%	4,06	4,06	4,26	4,26	Sesuai	
n.	STATISTIK SEKTORAL							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai	Semua OPD.
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai	Semua OPD.
o.	PERSANDIAN							
1	Persentase keamanan informasi pemerintah	%	100,00	35,13	100,00	100,00	Sesuai	Terdapat 26 dari 26 Sistem elektronik yang diassessment/ audit.
p.	KEBUDAYAAN							
1	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	%	100,00	100,00	100,00	0,00	Belum Tercapai	Pelaksanaan revitalisasi tidak dianggarkan.
2	Persentase Pembinaan kesenian Tradisional	%	20,00	0,00	30,00	10,00	Belum Tercapai	Anggaran ditujukan hanya untuk pengambilan gambar A'rera, tidak ada kegiatan lain.
3	Cakupan pembinaan sejarah lokal	%	100,00	0,00	100,00	0,00	Belum Tercapai	Tidak dianggarkan.
4	Benda situs dan kawasan Cagar budaya yang dilestarikan	%	100,00	50,00	100,00	10,26	Belum Tercapai	Dari 39 cagar budaya yang dilakukan rehabilitasi hanya 4 saja yaitu Makam We Tenri Dio, Gantarang Lalangbata, Kantor Disparbud, dan Koleksi Museum Nekara.
5	Jumlah pengelolaan museum	Unit	1 Museum	1 Museum	1 Museum	1 Museum	Sesuai	Kegiatan pengelolaan museum tersedia pada anggaran yang didapat dari DAK Non fisik.
q.	PERPUSTAKAAN							
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	4,40	9,40	4,50	4,50	Sesuai	Realisasi dapat tercapai sesuai target karena adanya kolaborasi dan koordinasi yang baik dalam tim.
2	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	17,00	0,00	33,00	0,00	Belum Tercapai	Kegiatan tersebut tidak terlaksana pada Tahun 2023 dikarenakan Tidak Dianggarkan.
r.	KEARSIPAN							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	90,00	52,26	90,00	55,68	Belum Tercapai	ANRI belum memberikan password dikarenakan daftar arsip yang diminta sebagai syarat akses jaringan belum rampung maka aplikasi belum bisa terbuka sehingga jumlah arsip yang telah dibuatkan daftar arsip belum terinput semua jadi untuk sementara masih dilakukan penginputan secara manual. Hal ini menyebabkan capaian kinerja program belum mencapai target.

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepinginan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	95,00	50,00	95,00	33,33	Belum Tercapai	Adanya empat dari enam indikator penilaian yang belum terpenuhi disebabkan keterbatasan anggaran maka nilai capaian kinerja program tersebut belum mencapai target.
3	Persentase Arsip dapat Diakses yang Sifatnya Tertutup/Rahasia (%)	%	100,00	10,00	100,00	0,00	Belum Tercapai	Karena pada Tahun 2023 tidak ada arsip tertutup yang tercipta.
PELAYANAN URUSAN PILIHAN								
a. KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Volume Produksi Perikanan Tangkap	Ton	21.845,74	21.223,40	23.593,40	24.962,90	Melampaui	1.Meningkatnya produksi pada kelompok ikan pelagis dipengaruhi oleh efektifitas alat tangkap jaring yang mulai massif digunakan oleh nelayan yang tersebar di berbagai desa pulau. Juga dipengaruhi oleh meningkatnya waktu (trip) penangkapan ikan pelagis sebagai dampak dari panjangnya musim tangkap (teduh) pada tahun 2023, terutama pada armada 3 GT dengan alat tangkap jaring seperti bagang perahu, purse seine, dan kapal motor lainnya. 2.Produktifitas nelayan tangkap berbasis komoditas ikan pelagis juga terdorong oleh terbukanya pasar lokal, baik untuk konsumsi masyarakat maupun untuk bahan baku olahan perikanan.
2	Volume Produksi Perikanan Budidaya	Ton	976,72	543,50	1.054,86	468,44	Belum Tercapai	Fenomena El-Nino menyebabkan turunnya volume perikanan budi daya di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023. Curah hujan yang rendah dan suhu air laut yang tinggi akibat El-Nino menyebabkan kematian massal rumput laut, kegagalan panen udang vaname, dan terhambatnya pertumbuhan ikan bandeng dan udang windu. Hal ini berakibat pada penurunan produksi budidaya secara keseluruhan, meskipun komoditas air tawar seperti nila dan lele tidak terpengaruh, namun kontribusinya terhadap total produksi tidak signifikan.

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
3	Volume Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	186,57	241,77	201,49	244,91	Melampaui	Hal ini terjadi karena adanya peningkatan produksi dan Rumah Tangga Perikanan (RTP) khususnya untuk jenis olahan penggaraman/pengeringan (produk ikan kering). Pada tahun 2023 jumlah Unit Pengolahan Ikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebanyak 128 UPI yang terdiri dari 5 RTP untuk jenis olahan fermentasi dan peragian (produk berupa terasi udang), 8 RTP untuk pelumatan daging dan surimi (produk bakso ikan) dan 110 RTP untuk penggaraman dan pengeringan (produk ikan kering) serta 5 RTP untuk jenis pengolahan lainnya (produk berupa abon ikan). Peningkatan jumlah RTP yang signifikan ini berpengaruh atau berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah produksi produk olahan hasil perikanan. Selain peningkatan jumlah RTP, terdapat faktor lain yang juga berpengaruh terhadap peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan yaitu meningkatnya kualitas SDM pengolah hasil perikanan yang telah mendapatkan pengetahuan melalui bimbingan teknis yang rutin dilakukan serta pemberian sarana/prasarana pengolahan ikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.
4	Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya dalam Kabupaten/Kota terhadap Peraturan Perundang-undangan (%)	%	5,27	0,00	10,54	10,54	Sesuai	Dari 349 RTP Budidaya, target yang diawasi adalah 36 RTP dalam dua tahun. Pada tahun 2022, tidak ada pengawasan karena keterbatasan anggaran. Pada tahun 2023, pengawasan dilakukan terhadap 24 RTP, melebihi target 18 RTP. Hasilnya, 21 RTP memiliki izin usaha yang sesuai, sedangkan 3 RTP belum memiliki izin. Berhasilnya pencapaian target ini disebabkan oleh domisili yang disasar pada tahun 2023 pada umumnya berdekatan, terutama di daerah kepulauan. Hal ini menyebabkan anggaran dan waktu yang digunakan lebih efektif dan efisien.
b.	PARIWISATA							
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	5,00	5,16	5,00	3,39	Belum Tercapai	Peningkatan kontribusi sektor pariwisata lebih sedikit dibanding PAD kabupaten.
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	5,00	786,36	5,00	-16,41	Belum Tercapai	Faktor keamanan akibat konflik dunia mempengaruhi jumlah wisatawan dari eropa dan sekitarnya untuk datang.
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten Kepulauan Selayar	%	10,00	242,87	10,00	-22,85	Belum Tercapai	Menurunnya jumlah wisatawan nusantara yang datang akibat wisatawan lebih memilih ke destinasi lain di luar Selayar.
4	Tingkat huniaan akomodasi	%	10,00	3,97	10,00	4,20	Belum Tercapai	Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan mengakibatkan berkurangnya jumlah wisatawan yang menginap di hotel.
5	Cakupan ketersediaan (fisik dan pengelolaan) sentra ekonomi kreatif	%	16,66	0,00	33,34	0,00	Belum Tercapai	Tidak pernah dianggarkan.
6	Persentase SDM/ tenaga kerja di sektor pariwisata yang mendapatkan pelatihan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai	Cuma 12 orang yang ditargetkan pada tahun 2023 sesuai anggaran yang tersedia.
c.	PERTANIAN							

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Cakupan Sarana pertanian	%	100	100	100	80	Belum Tercapai	Sarana pertanian yang tersedia berupa bibit tanaman, bibit ternak, pestisida, dan alsintan. Sarana pertanian yang ada dimanfaatkan oleh kelompok tani/ gabungan kelompok tani secara maksimal dalam upaya meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertaniannya. Hal ini didukung pula peran penyuluh pertanian sebagai fasilitator dalam pemenuhan kebutuhan kelompok tani terhadap sarana pertanian. Terdapat sarana pertanian yang tidak dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani karena adanya fenomena iklim atau dampak el nino.
2	Cakupan Prasarana Pertanian	%	100	97,37	100	100	Sesuai	Prasarana pertanian yang tersedia berupa jalan tani, irigasi usaha tani, dan DAM Parit digunakan oleh petani untuk mendukung meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertaniannya.
3	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana Penyakit Hewan Menular	%	5,65	78,63	5,28	30,86	Melampaui	Fasilitasi penanggulangan bencana penyakit hewan menular sebesar 325 area pada 1053 area yang terkena bencana atau sekitar 30.86%. Hal ini didukung oleh kegiatan yang dilakukan dilakukan melalui pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, pencegahan penyakit hewan, pengamanan penyakit hewan, pemberantasan penyakit hewan dan pengobatan penyakit hewan. Ketersediaan obat-obatan ternak dan perlengkapan kesehatan hewan sangat mempengaruhi proses pelayanan ternak kepada masyarakat/ peternak. Selain itu, SDM peternakan juga sangat berperan penting dalam pelayanan kesehatan hewan.
4	Persentase Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	%	21,99	21,85	20,89	20,75	Belum Tercapai	Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) berdampak pada semua kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, pengendalian OPT dilakukan pada beberapa komoditi baik komoditi perkebunan, hortikultura maupun tanaman pangan. Pengendalian dilakukan secara mekanis, sanitasi dan kimiawi. Pengendalian OPT didukung oleh adanya kolaborasi antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Selayar dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pengendalian OPT melalui GERDAL dengan pemanfaatan paket teknologi yang ramah lingkungan. Peran serta petani dan petugas pengamat hama juga sangat membantu dalam pengendalian OPT (pengetahuan dan keterampilan petani dan petugas).
5	Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian	%	5	100	5	100	Melampaui	Tahun 2023 terdapat 265 izin usaha pertanian yang diterbitkan yaitu izin pengeluaran ternak. Penerbitan izin mencapai 100% karena didukung adanya peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan dan Kesehatan Ternak.
6	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	19,17	26,95	22,72	17,14	Belum Tercapai	Jumlah kelompok tani dibina sampai tahun 2023 sebesar 17,14%. Rendahnya capaian dari target disebabkan karena kurangnya kelompok tani/ gabungan kelompok tani dari total poktan 887 yang memperoleh pembinaan dan pendampingan baik oleh tim teknis maupun penyuluh pertanian.
d.	PERDAGANGAN							

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Persentase Izin Usaha Sektor Perdagangan yang diterbitkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai	Izin usaha perdagangan dikeluarkan oleh DPMPSTP berdasarkan rekomendasi persetujuan DISDAGKUKM.
2	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai	Ketersediaan sarana prasarana perdagangan seperti pasar rakyat yang didanai oleh APBD, DAK, APBN sudah memadai.
3	Persentase jenis komoditi yang dipantau	%	100,00	20,58	100,00	68,42	Belum Tercapai	Dibanding tahun sebelumnya, jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) yang dipantau tahun 2023 meningkat jumlahnya sehingga persentase realisasi meningkat.
4	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	%	100,00	20,58	100,00	20,58	Belum Tercapai	Jumlah komoditi yang di ekspor masih sama dengan tahun sebelumnya sehingga persentase yang didapatkan pun sama dengan tahun sebelumnya.
5	Persentase alat ukur yang ditera	%	100,00	0,00	100,00	38,46	Belum Tercapai	Tera/ tera ulang tahun 2023 sudah terlaksana, namun perlu penambahan SDM Penerima karena tidak seimbang rasio antara Penerima dan Alat ukur yang ditera serta cakupan luas wilayah.
6	Persentase produk lokal yang dipasarkan	%	100,00	30,00	100,00	30,00	Belum Tercapai	Belum maksimalnya identifikasi produk lokal yang dipasarkan.
e. PERINDUSTRIAN								
1	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	%	12,00	10,00	15,00	0,00	Belum Tercapai	Tidak dilakukan pendataan.
2	Persentase Izin Pelaku IKM yang telah memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)	%	20,00	20,00	25,00	4,76	Belum Tercapai	Sosialisasi terkait aplikasi pendaftaran PIRT yang tidak pernah dilakukan karena tidak anggaran karena pendaftarannya melalui OSS sehingga yang terdaftar di PIRT tidak terpantau melalui pengawasan, dan kurangnya tenaga yang menangani aplikasi OSS.
3	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional	%	33	0,02	40,00	4,76	Belum Tercapai	Seharusnya dilakukan sosialisasi tentang SIINAS dalam menjalankan kegiatan ini, namun anggaran kurang dan diberikan setelah perubahan sehingga waktu tidak mencukupi; Pelaku IKM tidak memahami cara pendaftaran usaha dalam aplikasi SIINAS sehingga dilakukan kunjungan berulang-ulang ke pelaku IKM.
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
a. SEKRETARIAT DAERAH								
1	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai	Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan didalam renstra Setda dan Renja Bagian Pemerintahan.
2	Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	%	100,00	70,83	100,00	99,27	Belum Tercapai	Semua kegiatan telah dilaksanakan, namun terdapat anggaran yang tidak habis dibelanjakan pada beberapa sub kegiatan.
3	Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	%	100,00	100,00	100,00	99,98	Belum Tercapai	Semua kegiatan sudah selesai dilaksanakan, namun dari hasil perhitungan belanja tidak habis dibelanjakan sehingga masih ada tersisa anggaran di masing-masing sub kegiatan.
b. SEKRETARIAT DPRD								

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Persentase Program Kerja DPRD yang Trintegrasi dengan Program RPJM dan RKPD	%	100	100	100	100	Sesuai	Struktur organisasi kelembagaan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan tingginya komitmen dan kerja sama antar staf.
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
a. PERENCANAAN								
1	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	80	100	85	100	Melampaui	Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah program RPJMD yang tercantum dalam RKPD dan jumlah program RPJMD yang seharusnya ada dalam RKPD. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, dari 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) program perencanaan Pembangunan yang akan dilasanakan tahun 2023 sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 terdapat 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) program. pernyataan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 halaman 33.
2	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah	%	80	100	85	100	Melampaui	Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah program prioritas perangkat daerah yang sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan daerah dengan jumlah total program prioritas perangkat daerah, dari 72 (tujuh puluh dua) Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023, telah selaras dengan 17 (tujuh belas) Indikator Sasaran prioritas pembangunan daerah.pernyataan tersebut dapat dilihat pada pada Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 halaman 109.
b. KEUANGAN								
1	Persentase SILPA terhadap APBD	%	6,00	4,07	5,50	3,68	Melampaui	
2	Assets Management	ada	ada	ada	ada	ada	Sesuai	Dokumen Daftar Aset Kabupaten dan Semua Aset Kabupaten Tercantum di Aplikasi SIMDA.
3	Persentase Pertumbuhan Kenaikan Pendapatan Daerah	%	84	83,29	87,50	85,03	Belum Tercapai	Belum mencapai target disebabkan adanya kenaikan target dan rendahnya capaian dari target tersebut, yang disebabkan karena persentase penerimaan pajak daerah yang sebelumnya 100% turun menjadi 67,16% dari tahun sebelumnya.
c. KEPEGAWAIAN								
1	Persentase pemenuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah	%	89,21	23,35	90,40	82,16	Belum Tercapai	Persentase pemenuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah tahun 2023 target 90,40% dan terealisasi 82,16% Keterangan: Persentase Pemenuhan ASN Tahun 2023 tidak mencapai target dikarenakan dari 318 usulan formasi PPPK ditetapkan 314 formasi dan terealisasi sebanyak 258. diantaranya guru sebanyak 153, tenaga teknis terealisasi sebanyak 35 dan tenaga kesehatan terealisasi sebanyak 70. dari 314 formasi tersebut ada formasi yang kurang pendaftarannya dan ada formasi yg tidak ada pendaftarannya (kosong).

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
2	Presentase Pegawai Berkinerja Baik	%	100	96,67	100,00	99,78	Belum Tercapai	Persentase pegawai berkinerja baik pada tahun 2023 target 100% realisasi 99,78% Keterangan: Persentase pegawai berkinerja baik pada tahun 2023 tidak mencapai target dikarenakan jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan disiplin baik itu pembinaan disiplin ringan, sedang dan berat berjumlah 9 orang.
d. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Cakupan ASN yang lulus diklat kepemimpinan/ manajerial, diklat fungsional dan diklat teknis	%	80,25	150,70	81,00	74,16	Belum Tercapai	Cakupan ASN yang lulus Diklat kepemimpinan / manajerial, fungsional dan teknis Tahun 2023 target 81,00% dan terealisasi 74,16%. Keterangan: Cakupan ASN yang lulus Diklat kepemimpinan/manajerial, diklat fungsional dan diklat teknis tidak mencapai target dikarenakan kurangnya usulan dari OPD untuk mengikuti pelatihan bagi jabatan fungsional dan biaya kontribusi pelatihan tiap lembaga penyelenggara pelatihan tidak sama sehingga tidak sesuai dengan indeks yang ada pada DPA.
e. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	%	100	100	100	100	Sesuai	Setiap tahun terdapat 2 hasil penelitian dan pengembanganyang dimasukkan dalam penyusunan Dokumen Rancangan Awal Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD).
f. TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK								
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Ada / Tidak ada	ada	ada	ada	ada	Sesuai	Operator PPID dan SP4N Lapor.
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Ada / Tidak ada	ada	ada	ada	ada	Sesuai	Dokumen Perda APBD, Dokumen Perkada APBD, Nota Keuangan, LRA Seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD Yang Sudah di Audit, Opini Atas LKPD dan Dokumen RKA/DPA Kabupaten.
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
a. INSPEKTORAT DAERAH								
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,000	3,002	3,000	3,002	Melampaui	Berdasarkan Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penilaian SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022; Tahun 2023 tidak dilakukan Penilaian Cepat, melainkan dilakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; Tahun 2023 Tidak dilakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh Perangkat Daerah Sampel (pemenuhan 30% Sasaran Strategis dan 40% Anggaran);Progres Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023 yaitu Penetapan Surat Keputusan Bupati tentang Satgas SPIP, Surat Tugas Bupati tentang Pelaksanaan PM dan Penetapan Perangkat Daerah Sampel.
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,000	2,110	3,200	2,810	Belum Tercapai	Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah belum didasari dengan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR); Belum mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR dan risiko tertinggi; Belum memadainya upaya Pengembangan SDM dalam keikutsertaan pada diklat/bimtek.

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
UNSUR KEWILAYAHAN								
a.	KECAMATAN							
1	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Menit	25	25,71	20,00	19,09	Melampaui	Pelayanan didukung sarana dan prasarana yang cukup, serta koordinasi dan kerja sama sesama pegawai yang baik.
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	%	100	97,73	100,00	99,00	Belum Tercapai	Walaupun masyarakat sudah mulai mendukung dan mengikuti acara musrenbang sebagai wadah partisipasi, tetapi tingkat partisipasi yang dicapai masih belum maksimal atau belum sesuai target yang diharapkan.
3	Penurunan kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	%	1	0,43	1,00	0,39	Melampaui	Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kecamatan, Kepolisian (Kapolsek), TNI (Danramil), Kepala Desa, Babinsa (Bintara Pembina Desa), Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), serta stakeholder terkait lainnya.
4	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	%	0	0,00	0,00	0,00	Sesuai	Adanya kerja sama antara pemerintah kecamatan, kepala desa, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta stakeholder terkait dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya konflik sosial dan keagamaan.
5	Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	%	50	83,77	55,00	70,22	Melampaui	Adanya koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di desa.
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
a.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
1	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Karakter	%	0,026	0,016	0,026	0,020	Belum Tercapai	Realisasi 0,020% hampir mencapai target sebesar 0,026% dari angka tersebut dapat dilihat kinerja Badan Kesbangpol sedikit lagi mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Kesbangpol telah berkembang dalam mengejar target yang telah ditetapkan sehingga realisasi kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan, tes urine secara acak (random) pada kelompok sasaran serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi penyuluhan pencegahan bahaya peredaran atau penggunaan narkoba kepada generasi muda, tokoh masyarakat, PKK Kabupaten, PKK kecamatan, desa dan kelurahan terfasilitasinya penguatan ideologi pancasila kepada siswa/siswi SMA/SMK/MAN/ Negeri dan Swasta se kecamatan Benteng.
2	Persentase Partai Politik yang Mengikuti Pendidikan Politik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai	Capaian target indikator parpol yang mengikuti pendidikan politik sesuai target meskipun pelaksanaan program yang mendukung tercapainya indikator sasaran pada tahun 2023 tetap dilaksanakan meskipun tidak ada pemilu, hal ini penting karena bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2024 yang difokuskan pada pemilih pemula, Dalam pelaksanaannya dikarenakan tidak ada pemilu dalam pileg, pilpres, pilgub dan pilbup disamakan target tahun 2023 yaitu sebesar 100%. tujuan pendidikan politik adalah memperkecil kemungkinan masyarakat wajib pilih golput dan adanya suara tidak sah pada pemilu sehingga angka partisipasi pemilu meningkat melalui pemahaman pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol.

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai	Capaian target indikator sasaran ormas yang dibina sesuai yang ditargetkan sebesar 100% dengan terfasilitasinya ormas yang dibina dan terfasilitasinya ormas yang mendapatkan hibah bantuan keuangan ormas.
4	Persentase Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Dirumuskan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai	Capaian target indikator sasaran persentase kebijakan bidang Ekososbud yang dirumuskan sesuai yang ditargetkan 100% yaitu penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang Ideologi dan Wasbang dan Ketahanan Ekososbud dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi bidang Ideologi Wasbang, Ketahanan Ekososbud dan agama yaitu pelaksanaan kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Kab Kepulauan Selayar, pelaksanaan kegiatan Peringatan hari Kesaktian Pancasila Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023, pelaksanaan Pembentukan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2023-2026, pelaksanaan kegiatan Tes Urine Secara Acak Pada Kelompok Sasaran, pelaksanaan kegiatan Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran atau Penggunaan Narkoba Kabupaten Kepulauan Selayar, dan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Moderasi Beragama Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar.
5	Prosentase Wilayah yang dibina kewaspadaannya terhadap bahaya terorisme / radikalisme dan konflik sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai	Capaian target indikator sasaran persentase wilayah yang dibina kewaspadaannya terhadap bahaya terorisme/radikalisme dan konflik sosial sesuai yang ditargetkan 100% yaitu terselenggaranya pemantapan kewaspadaan nasional, optimalisasi kegiatan kewaspadaan dini dengan penanganan konflik yang ada dan fasilitasi penanganan konflik, fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat, kegiatan fasilitasi kewaspadaan daerah, pelaksanaan koordinasi jajaran forum koordinasi pimpinan daerah, Pemantauan Orang Asing di Kabupaten Kepulauan Selayar.
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI								
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	988.346	996.286	991.247	1.054.071	Melampaui	Peningkatan PDRB per kapita dari tahun sebelumnya mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan masyarakat secara umum. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, daya beli masyarakat juga meningkat, sehingga memungkinkan peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga.
2	Nilai tukar petani	Poin	100,18	101,12	101,37	114,25	Melampaui	NTP gabungan Prov. Sulsel

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
3	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	60,42	27,16	61,77	38,27	Belum Tercapai	Persentase Desa berstatus swasembada (Maju dan Mandiri) terhadap total Desa untuk Tahun 2023 sebesar 38,27% dimana dari 81 desa di Kabupaten Kepulauan Selayar Status Desa Mandiri sebanyak 14 Desa yaitu Desa Bontosunggu, Desa Tanete, Desa Bungiaya, Desa Bontonasaluk, Desa Onto, Desa Maharayya, Desa Tamalanrea, Desa Barugaiya, Desa Harapan, Desa Patikarya, Desa Patilereng, Desa Bonerate, Desa Botilempangan sedangkan Desa Maju sebanyak 17 Desa antara lain Desa Bontorangnga, Desa Pamatata, Desa Kayu Bauk, Desa Barat Lambongan, Desa Menara Indah, Desa Bonea Timur, Desa Laiyolo Baru, Desa Laiyolo, Desa Lowa, Desa Appatanah, Desa Khusus Bahuluang, Desa Kembang Ragi, Desa Buki, Desa Lalang Bata, Desa Balang Butung, Desa Kohala Dan Desa Buki Timur.

Rekap Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023 Berdasarkan Kategori

Kategori	Indikator	
	Jumlah	%
Dalam Proses	5	2,19
Belum Tercapai (<)	98	42,98
Sesuai (=)	69	30,26
Melampaui (>)	56	24,56
Total	228	100,00